



## Agama dan Kesadaran Multikultural dalam Perspektif K.H. Abdurrahman Wahid

Syarif Hidayatullah\*<sup>1</sup>, Imam Wahyuddin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

Jl. Olahraga, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

**Abstract:** *This research aims to: first, identify the reasons for the importance of religious multicultural awareness; second, mapping K.H. Abdurrahman Wahid's thoughts on multicultural consciousness in religion; and, third, analyze the influence of K.H. Abdurrahman Wahid's multicultural thinking on religious life in Indonesia. The study used a qualitative-descriptive approach, namely to describe the religious thoughts of KH. Abdurrahman Wahid on the awareness of religious multiculturalism. The results of the study revealed that: first, religious multicultural awareness is very important for the Indonesian nation due to globalization which gives birth to complexity and multiplicity of problems in various fields of life. Second, Wahid's thinking about religious multicultural consciousness is based on his view of multiculturalism itself, which he interpreted as recognition of cultural, ethnic, racial, religious and gender heterogeneity. Wahid's multicultural thinking can be seen from several aspects: the characteristics of multiculturalism, the indigenization of Islam, the relationship between religion and state, democratization, the principles of humanism and plurality of society, and the relationship between religion and culture. Third, Wahid's multicultural thinking had a major influence on religious life in Indonesia. Gus Dur's thoughts on multicultural values have implications for the creation of a tolerant, safe, just, peaceful and compassionate life in the nation, state and society of Indonesia.*

**Keywords:** *Indonesian; religious multiculturalism; Abdurrahman Wahid; Multicultural values*

**Intisari:** Penelitian ini bertujuan: pertama, mengidentifikasi alasan pentingnya kesadaran multikultural beragama; kedua, memetakan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang kesadaran multikultural dalam beragama; dan, ketiga, menganalisis pengaruh pemikiran multikultural K.H. Abdurrahman Wahid bagi kehidupan beragama di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni untuk menggambarkan pemikiran keagamaan KH. Abdurrahman Wahid tentang kesadaran multikulturalisme beragama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: pertama, kesadaran multikultural beragama sangatlah penting bagi bangsa Indonesia akibat globalisasi yang melahirkan kompleksitas dan multiplisitas permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, pemikiran Gus Dur tentang kesadaran multikultural beragama dilandasi pandangannya tentang multikulturalisme itu sendiri, yang diartikannya sebagai pengakuan terhadap heterogenitas budaya, etnik, ras, agama dan gender. Pemikiran multikultural Gus Dur ini dapat dilihat dari beberapa aspek: karakteristik multikulturalisme, pribumisasi Islam, hubungan agama dan negara, demokratisasi, prinsip-prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat, dan hubungan antara agama dan budaya. Ketiga, pemikiran multikultural Gus Dur memiliki pengaruh besar bagi kehidupan beragama di Indonesia. Pemikiran Gus Dur tentang nilai-nilai multikultural berimplikasi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil, damai dan kasih sayang antar sesama.

**Katakunci:** *Indonesia; multikulturalisme beragama; Abdurrahman Wahid; nilai-nilai multikultural*

---

\*E-mail Korespondensi: [syarifhidayatullah@ugm.ac.id](mailto:syarifhidayatullah@ugm.ac.id)

DOI: [10.24090/jpa.v25i2.2024.pp161-189](https://doi.org/10.24090/jpa.v25i2.2024.pp161-189)

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara plural memiliki berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Hal ini menjadi tantangan untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Perlu adanya upaya yang masih dalam hal ini salah satunya adalah menerapkan konsep Islam wasathiyah atau yang belakangan lebih populer dengan moderasi Islam. Islam wasathiyah adalah sikap atau pandangan yang berposisi di tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Ia juga menuntut untuk berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam hidup berbangsa dan bernegara, dunia perpolitikan tidak dapat dihindarkan, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini konsep Islam wasathiyah berperan untuk menggerakkan politik Islam yang ada di Indonesia. Tanpa hal tersebut kiranya akan mustahil gagasan politik Islam dapat dikembangkan di Indonesia (Bistara & Marintan, 2022).

Menurut R. Siti Zuhro, Indonesia adalah negara paling majemuk di dunia. Ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Sementara itu, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1991 hingga 2017 bahasa yang telah tervalidasi berjumlah 652 bahasa dari 2.452 daerah pengamatan. Selain kepercayaan lokal, semua agama-agama besar dunia juga ada di Indonesia. Dengan kemajemukan Indonesia lahir karena adanya mimpi bersama untuk membangun bangsa yang damai, adil dan makmur. Bukan untuk kepentingan satu atau beberapa golongan (Kewuel et al., 2017).

Sebagai cendekiawan, Abdurrahman Wahid hadir untuk memberikan pemahaman mengenai politik Islam dengan kerangka berfikir Islam wasathiyah. Gagasan politik Islam Abdurrahman wahid merupakan gagasan politik kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya dalam dunia politik yang merupakan pelaku atau praktisi merupakan manusia dan untuk kemaslahatan manusia. Dalam memberikan perannya di Indonesia politik Islam yang dilakukan oleh tokoh yang populer disapa dengan panggilan Gus Dur ini bersifat etis. Hal tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam untuk berlaku adil dalam kehidupan sosial masyarakat. konsep etika sosial Islam dipakai untuk membentuk tatanan sosial masyarakat yang adil. Hal tersebut juga diterapkan oleh Abdurrahman wahid dalam gagasan Islam wasathiyah dalam dunia politik Islam di Indonesia (Bistara & Marintan, 2022).

Gus Dur juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang konsern dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai multikulturalisme dan pendidikan damai di Indonesia. Keragaman atau multikulturalisme merupakan sebuah realitas yang ada di negeri ini. Namun, sejak orde baru berkuasa, masyarakat Indonesia yang dikenal beragam dipaksa untuk taat dan patuh terhadap aturan pemerintah sebagai akibat dari hal tersebut dan kebebasan berpendapat dibungkam. Pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid, kebebasan berbicara kembali terbuka lebar (Fahmi, 2022).

Perjalanan intelektual seorang Abdurrahman Wahid, menurut Syafii Anwar, lebih merupakan “proses menjadi” (*process of becoming*), daripada “proses adanya” (*process of being*). Yang menarik dan hampir jarang diketahui adalah, bahwa seorang Gus Dur yang kita kenal sebagai pemikir liberal itu, di masa mudanya juga tertarik pada pemikiran *Ikhwanul Muslimin* yang umumnya sangat konsen dengan ideologisasi Islam. Tetapi setelah melalui pendidikan dan pengalaman pribadi, akhirnya mengantarkannya menjadi cendekiawan Muslim liberal, yang secara sadar menolak konsepsi atau gerakan yang mengusung tema-tema yang berorientasi pada ideologisasi Islam. Penjelasan ini cukup penting karena ia bisa menjadi semacam perspektif bahwa pendidikan, bacaan, dan pengalaman seseorang bisa merubah pandangan hidup dan pemikirannya (A. Wahid, 2006). Disinilah letak urgensi sebuah penelitian yang mengkaji pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang kesadaran multikultural dalam beragama di Indonesia.

Dengan latar belakang seperti dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa perlu kesadaran multikultural dalam beragama?, b) bagaimana pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang kesadaran multikultural dalam beragama?, dan c) bagaimana pengaruh pemikiran multikultural K.H. Abdurrahman Wahid bagi kehidupan beragama di Indonesia?

### **Metode**

Penelitian merupakan penelitian agama, khususnya pemikiran keagamaan dari seorang tokoh, KH. Abdurrahman Wahid, yang berbentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif; yakni penelitian yang berusaha untuk menggambarkan gejala keagamaan (Sayuthi Ali, 2002). Dengan demikian, peneliti menetapkan bahwa objek

material dari penelitian ini adalah pada pemikiran multikulturalisme K.H.Abdurrahman Wahid bagi kehidupan beragama di Indonesia. Sedangkan yang menjadi sudut pandang atau objek formal penelitian ini adalah filsafat agama. Sebagaimana lazimnya dalam jenis penelitian ini maka dapat ditetapkan beberapa unsur metodologis yang khas dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu: satuan kajian, desain, cara pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pentingnya Kesadaran Multikultural dalam Beragama**

Kemajuan globalisasi kontemporer melahirkan kompleksitas dan multiplisitas akibat transformasi dan transmudasi hidup manusia dari jagad fisik atau jagad real menuju dunia cyber-space yang disebut jagad digital dan virtual. Kompleksitas dan multiplisitas ini tidak hanya mencakup kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya namun juga keagamaan. Kompleksitas dan multiplisitas dalam konteks keagamaan memuat problem eksistensial kemanusiaan yang berbeda dengan konstruksi globalisasi keagamaan sebelumnya (Sutikno, 2022). Dalam globalisasi kontemporer, problem eksistensial kemanusiaan khususnya di kalangan umat Islam merupakan konsekwensi logis dan rasional untuk mempertegas apa yang disebut kejut budaya atau–meminjam futurolog Alvin Toffler- *cultural shock* dalam struktur –yang oleh Hans Kung dan Marshall McLuhan disebut--desa global (*global village*) tanpa batas-batas teritorial dalam hubungan antar manusia yang dimediasi internet (Sutikno, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menjadikan globalisasi sebagai gelombang besar yang tidak dapat dihindari. Pada satu sisi, globalisasi merupakan gelombang positif yang dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk turut serta dan berperan aktif dalam membangun peradaban dunia. Tetapi pada sisi lain, globalisasi dengan berbagai perangkat-perangkatnya telah memaksa masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia pada umumnya, untuk melebur sekaligus melepas berbagai bentuk identitas kebangsaannya. Dalam konteks inilah masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia pada umumnya, dapat dikatakan sedang mengalami kegamangan. Arus globalisasi seakan telah menyeret suatu bangsa pada gelombang peleburan identitas-identitas personal menjadi komunitas masyarakat global yang

tidak lagi tersekat oleh identitas budaya, agama, dan lain sebagainya (Ridwan et al., 2018).

Kemajuan teknologi informasi sebagai jantung utama globalisasi kontemporer merupakan keniscayaan dialektis dengan Agama-agama, khususnya Islam, bagi kontinuitas presentasi, interaksi, komunikasi, informasi dan lainnya baik di wilayah doktrinal maupun aktual. Dinamika Islam dalam globalisasi ini tidak lepas dari kalangan Islam sendiri yang memosisikan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi sebagai berkah (*blessing in disguise*) dalam peradaban manusia. Namun pandangan monolitik atas globalisasi ini kerap kali menimbulkan sikap fanatis atas globalisasi tanpa membuka ruang lahirnya potensi pemikiran dan langkah kritis berbagai implikasi dan konsekwensinya (Sutikno, 2022).

Konsekuensi logis yang menimpa masyarakat-bangsa Indonesia akibat gelombang ini adalah semakin tergerusnya identitas Keindonesiaan itu sendiri. Tentu, hal ini tidak diartikan sebagai akibat dari minimnya landasan filosofis- ideologis yang dapat dipedomani oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, perkembangan globalisasi yang semakin tak terkendali telah melahirkan tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, landasan filosofis-ideologis bangsa Indonesia yang telah ada sebelumnya, perlu ditafsir ulang sebagai upaya kontekstualisasi dan adaptasi dengan tantangan global dewasa ini. Dalam konteks inilah maka upaya rethinking, reaktualisasi dan revitalisasi identitas “Keindonesiaan” dapat menjadi alternatif dalam membentengi masyarakat Indonesia dari gempuran globalisasi. Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang membutuhkan sebuah landasan filosofis-ideologis yang dapat dipedomani agar tidak mudah tertipu oleh rayuan globalisasi yang cenderung meninabobokkan. Melalui upaya rethinking, reaktualiasi, dan revitalisasi itulah kita bisa menyelamatkan bangsa kita dari zaman “kemiskinan” identitas (Ridwan et al., 2018).

Dalam konteks ruang publik global, perebutan peran bukan lagi hal yang asing dan aneh sebagaimana banyak diungkap oleh ahli sosiologi dan komunikasi semacam Max Weber dan Juergen Habermas. Konflik dan ketegangan antar agama dan peradaban di dunia, seperti kerusuhan di Pattani Thailand, Poso, Palu, Palestina-Israel dan lain-lain, sudah seharusnya diselesaikan dengan menempuh jalan dialog. Tapi, menurut Choirul Mahfud, dialog tersebut harus dialogis. Dialog yang dialogis penting

dilakukan sebab selama ini jalan dialog selain tidak dialogis juga tidak setara, seimbang dan adil. Selain jalan dialog dialogis, lebih penting lagi adalah membangun solidaritas dunia yang diwujudkan secara nyata dengan terus menjaga perdamaian dunia yang mendasarkan pada etika kehidupan global yang adil, damai dan sejahtera (Mahfud, 2019).

Menelisik tanggapan kritis dan serangan terhadap multikulturalisme, simbol-simbol religius, imigran, dan perempuan di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, menurut Lumowa, seringkali menjadi sumber perdebatan dalam hubungannya dengan batasan konseptual multikulturalisme. Lagi pula, ketiga hal tersebut tidak muncul sebagai fenomena tunggal, tetapi tereksresi sebagai satu problem sosial dengan tiga wajah kembar. Inggris, Jerman, dan Prancis mengalami tiga wajah tersebut sebagai pengejawantahan problem sosial mereka. Reaksi berbeda terjadi di Indonesia. Berhadapan dengan konflik-konflik perbedaan budaya, agama, dan ras, kumandang narasi otoritatif justru mendaraskan kembali fakta primordial Indonesia sebagai negara multikultural. Alasannya, pluralitas budaya, agama, dan ras, hakiki bagi kehidupan masyarakat Indonesia (Lumowa, 2022). Argumen deskriptif ini, menurut Achmad Charis Zubeir, menjangkar pada kenyataan demografis negara Indonesia.

Multikulturalisme didalamnya mengandung nilai-nilai toleransi, (inklusif), humanis dan adil yang bisa dijadikan bahan untuk pendidikan damai. Penanaman nilai toleransi dapat menenangkan jiwa yang sebelumnya penuh emosi, nafsu dan amarah untuk berbuat kekerasan, pengrusakan dan konflik. Pendidikan tentang nilai-nilai multikulturalisme diharapkan dapat melahirkan orang yang memiliki jiwa yang dipenuhi ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antar sesama. Maka, terwujudnya masyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil dan damai bukanlah sekedar cita-cita semata (Fahmi, 2022).

Warga dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan berbagai keragaman budaya, baik suku, etnis, agama serta ideologi yang merupakan keunikan bagi Negara Indonesia tersendiri. Dengan keragaman ini diharapkan dapat membentuk sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat dengan tanpa memandang perbedaan agama, warna kulit, etnis, ras, dan status sosial,

serta tanpa menaruh rasa curiga dan prasangka buruk terhadap kelompok lain. Sebagai anggota masyarakat, umumnya bangsa dan negara sudah terlanjur majemuk yang konsekuensinya adalah menghormati pluralitas masyarakat itu sendiri, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dan perdamaian antara sesama masyarakat di dalamnya (Miskan, 2018: 38).

Seiring dengan hal tersebut, kehadiran Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai multikulturalisme sebagai alat perjuangannya merupakan suatu terobosan baru untuk menyatuhkan kemajemukan di dalam masyarakat yang heterogen dan pluralisme. Bahkan beliau berpendapat bahwa, demi memajukan suatu bangsa dan menegakkan pluralisme dalam masyarakat, hal itu bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena itu masih rentang terhadap munculnya kesalahpahaman antara kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi atau disagreement (Miskan, 2018: 39).

Namun demikian, menurut Gus Dur, terhadap pluralisme itu sendiri harus ada penghargaan yang tinggi yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal serta berdialog secara tulus dan juga harus membuka diri untuk mau belajar terhadap perbedaan tersebut sehingga kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dapat saling menerima terhadap perbedaan-perbedaan tersebut (Miskan, 2018: 39). Bagi Gus Dur, dalam menghadapi pluralitas masyarakat, baik pluralitas agama, budaya, maupun etnik, harus ada kemampuan untuk menempatkan setiap kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya tanpa diskriminasi dan ketidakadilan dalam hal apapun. Di sini, setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam berpendapat di muka umum, berkarya, dan beribadah, serta mendapatkan keadilan dan membedakan unsur agama, suku, jender dan kewarganegaraan (Miskan, 2018: 36).

Laode Ida, dikutip Miskan, mengatakan bahwa pemikiran kebangsaan dan perjuangan Gus Dur sudah sepantasnya dijadikan rujukan bagi penyelenggara negara demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai (Miskan, 2018: 39). Pemikirannya yang meliputi wacana hubungan agama dengan negara, demokratisasi, pluralisme, dan pribumisasi dan Indonesianisasi Islam, merupakan pemikiran segar yang lahir dari refleksi atas pemahaman dan penghayatannya tentang Islam secara

kontekstual (Rusli, 2015:50). Selain itu, cita-cita demokratisasi, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan menjunjung tinggi nilai pluralistik merupakan ide-ide pemikiran Islam Kontemporer yang dapat diapresiasi dan digali dari pemikiran Gus Dur (Rusli, 2015: 52).

## **2. Kesadaran Multikulturalisme Beragama dalam Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid**

Gus Dur adalah salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya multikulturalisme di tengah-tengah masyarakat, baik secara politik maupun dalam konteks budaya. Gus Dur sebagai tokoh multikulturalisme mencoba merangkul semua perbedaan dalam konsep pemikirannya (Miskan, 2018: 34). Menurut Gus Dur multikulturalisme merupakan suatu pengakuan terhadap heterogenitas budaya, etnik, ras, agama dan gender. Multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan bersama apabila realitas heterogenitas terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks inilah peran serta masyarakat sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa agar kemajemukan tersebut dapat tampil sebagai kekuatan untuk membangun bangsa (Miskan, 2018: 38).

Gus Dur sangat terbuka terhadap konsep multikulturalisme yang berusaha mengakomodir segala perbedaan dengan selalu hidup berdampingan secara damai. Hal tersebut dilakukan Gus Dur tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional saja, namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (*ushul al-fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum (*qawaid fiqhiyah*), serta pemikiran kesarjanaaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual. Dalam konteks pemikiran multikulturalisme, Gus Dur tidak hanya mengadopsi cara berpikir klasik, tetapi juga berusaha mencampurkannya dengan pemikiran modern (Miskan, 2018: 35).

Pemikiran-pemikiran Gus Dur secara langsung yang telah tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik berupa buku yang ditulis sendiri maupun yang di edit oleh orang lain dalam bentuk artikel, makalah, dan tulisan ilmiah lainnya (Miskan, 2018: 38). Diantaranya adalah: 1) *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, diterbitkan The Wahid Institute pada 2007, 2) *Islamku, Islam Anda Islam*

*Kita*, diterbitkan The Wahid Institute pada 2006, 3) *Santri Par Excellence Teladan Sang Guru Bangsa*, diterbitkan PT. Kompas Media Nusantara pada 2010, 4) *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, diterbitkan LkiS pada 1999, 5) *Bunga Rampai Pesantren*, Darman Bhakti pada 1979, 6) *Muslim di Tengah Pergumulan*, diterbitkan Lipenas pada 1991, dan 7) *Tabayun Gus Dur : Pribumisasi Islam Hak Minoritas Reformasi Kultural* diterbitkan LkiS diterbitkan pada 2010.

Menurut Miskan, pemikiran Gus Dur tentang multikulturalisme dapat dilihat dari beberapa aspek: aspek mengenai pribumisasi Islam, nilai-nilai demokrasi dan HAM, prinsip-prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat, serta karakteristik multikulturalisme (Miskan, 2018: 34). Sedangkan menurut Rusli, pemikiran Gus Dur tentang wacana hubungan agama dengan negara, demokratisasi, pluralisme, dan pribumisasi dan Indonesianisasi Islam, merupakan pemikiran segar yang lahir dari refleksi atas pemahaman dan penghayatannya tentang Islam secara kontekstual (Rusli, 2015: 50). Selain itu, Gus Dur memiliki pandangan yang positif tentang relasi agama dan budaya. Jika dilacak, dari segi kultural, menurut Al-Zastrouw Ng, Gus Dur memang melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, kultur dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan *apreciate* dengan budaya lokal; kedua, budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras; dan ketiga, lapisan budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur membentuk sinergi (M. Wahid, 2010).

Jenis tulisan Gus Dur pun beragam, mulai dari bentuk tulisan yang serius-akademis hingga tulisan ringan-populer, semuanya dilakukan Gus Dur. Namun begitu, untuk kepentingan pemahaman makro pemikiran Gus Dur, secara simplifikasi tulisan-tulisan tersebut oleh Marzuki Wahid dikelompokkan ke dalam tujuh tema pokok: 1). pandangan-dunia pesantren, 2). pribumisasi Islam, 3. keharusan demokrasi, 4. finalitas negara-bangsa Pancasila, 5. pluralisme agama, 6. humanitarianisme universal, dan 7. antropologi kiai (M. Wahid, 2010).

Menurut analisis Miskan, ada dua karakteristik multikulturalisme yang dikembangkan oleh Gus Dur yaitu: Pertama, prinsip multikulturalisme telah diakui di dalam kitab suci al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan bahwa pluralitas masyarakat baik dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa, merupakan kehendak Allah SWT

(Sunnatullah). Karena itu upaya penyeragaman dan berbagai bentuk hegemonisasi yang lain, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat dasar al-Qur'an yang menjadi alat uji kualitas keberagamaan seseorang (Miskan, 2018: 43). Kedua, nalar keragaman NU sepenuhnya ia bangun di atas spirit multikultural yang harus mengikuti tradisi pemikiran madzhab yang menjadi pilar tegaknya peradaban fiqih. Ajaran Islam dalam pemahaman tersebut harus digali secara langsung dari sumbernya sehingga terhindar dari pendekatan tekstual dan interpretasi tunggal terhadap al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam hal ini, Fiqih dirumuskan sebagai hukum atau kumpulan hukum yang ditarik dari dalil-dalil syar'i, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits (*al-ahkam al-mustanbathah min adillatihâ al-syar'iyah*). Definisi tersebut menurut Gus Dur, secara jelas menampakkan adanya proses untuk memahami situasi yang di situ ayat al-Qur'an dan al-Hadits memperoleh pengolahan untuk disimpulkan berdasarkan kebutuhan manusia. Dari pemahaman tersebut terlihat bahwa multikulturalisme yang dikembangkan Gus Dur adalah revitalisasi dari ajaran Islam dan tradisi berpikir pesantren yang telah berkembang selama-berabad-abad. Bahkan toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan Gus Dur tidak sekedar menghormati dan menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain (Miskan, 2018: 43).

Ideologi multikulturalisme yang dibawa oleh Gus Dur sepenuhnya mengarah pada penghormatan pada pluralitas masyarakat yang majemuk dari perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan pemahaman terhadap ajaran Islam serta tradisi keilmuan NU yang menjadi ikon dalam dirinya sehingga terwujudnya ide-ide yang jitu dalam mengatasi masalah umat manusia. Ideologi Gus Dur juga bisa memberikan inspirasi kuat terhadap pembentukan masyarakat yang damai dan harmonis (Miskan, 2018: 42).

Sedangkan yang dimaksudkan gagasan pribumisasi Islam Gus Dur adalah bagaimana supaya agama Islam dan budaya mempunyai independensi (kebebasan) masing-masing, meskipun keduanya mempunyai wilayah yang tumpang tindih. Agama Islam bersumberkan wahyu yang memiliki norma sendiri yang cenderung bersifat permanen, sedangkan budaya adalah buatan manusia, yang berkembang sesuai

dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya (Miskan, 2018: 40).

Gagasan pribumisasi Islam yang ditawarkan Gus Dur diungkapkan pada tahun 1980-an merupakan bentuk kritik terhadap “Arabisasi”; yang kerap disuarakan oleh kelompok Muslim tertentu di Indonesia. Gus Dur meminta agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Sehubungan dengan hal ini, ia melansir apa yang disebutnya dengan “pribumisasi Islam” sebagai upaya melakukan “rekonsiliasi” Islam dengan kekuatan-kekuatan budaya setempat, agar budaya lokal itu tidak hilang. Di sini pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan, bukannya sebagai upaya menghindari polarisasi antara agama dengan budaya setempat (A. Wahid, 2006).

Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena dalam pribumisasi Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Pribumisasi Islam juga bukan semacam “Jawanisasi” atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada *ushul fiqh* dan *qâidah fiqh*. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama, tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membentuk panteisme (A. Wahid, 2006).

Gus Dur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan agama dan negara. Dalam pemikirannya, Gus Dur melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar terhadap ideologi-ideologi negara yang sedang berkembang (Rusli, 2015: 56). Gus Dur tidak pernah memimpikan sebuah negara yang menganut ideologi Islam secara formal tetapi nilai-nilai Islam tertanam dalam setiap pribadi Muslim Indonesia. Apa yang disebutnya dengan partikel-partikel agama yang bisa masuk ke dalam negara dalam bentuk

undang-undang oleh Gus Dur dijelaskan lebih lanjut bahwa Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pemeluknya, sedangkan negara seperti republik Indonesia tidak akan memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita di negeri ini (Rusli, 2015: 57).

Dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara, Gus Dur selalu menghubungkan antara agama (Islam) dengan Pancasila. Pada hampir semua tulisannya, Gus Dur menegaskan pentingnya pemisahan antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur meletakkan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan Kaum Muslimin, dan bahwa antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan menjadikan terma negara, agama, dan Pancasila sebagai wahana menyatakan pikiran-pikiran dan pesan-pesannya, Gus Dur ingin membedakan dirinya dengan pihak lain yang memilih Islam untuk tujuan yang sama. Juga, boleh jadi bahwa Gus Dur menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperbaiki landas pijaknya di tengah gerakan Islam yang paling marak (Rusli, 2015: 59). Karena itu, bagi Gus Dur, dalam pandangan Islam tidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islami, ini berarti tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah negara Islam (A. Wahid, 2006: 6).

Gus Dur menolak ide “negara Islam”, karena alasan adanya kekeliruan para penyokong dalam menafsirkan al-Quran. Di satu pihak, mereka selalu mengemukakan bahwa kitab suci, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 208, menyatakan; “Masukilah Islam/kedamaian secara keseluruhan” (*udkhulû fî alsilmi kâffah*), yang menurutnya, jelas-jelas harus ditafsirkan dengan mengambil Islam tidaklah boleh sepotong-potong belaka. Padahal, Islam juga menolak atas sikap mengkhususkan sekelompok manusia dari kelompok-kelompok lain. Ini adalah prinsip yang mulia, namun sedikit sekali yang diperhatikan kaum Muslimin. Dalam hal ini, menurutnya, mereka dapat dinyatakan “terkena” firman Tuhan dalam kitab suci tersebut; “Tiap kelompok sangat bangga

dengan apa yang dimilikinya” (kullu hizbin bimâ ladaihim farihûn) (QS al-Mu’minûn (23): 45) dengan mementingkan “milik sendiri” itu, mereka melupakan firman lain: “Dan tiadalah Ku-utus Engkau Ya Muhammad, kecuali sebagai pembawa persaudaraan bagi umat manusia” (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lî al-‘alamîn*) (QS al-Anbiyâ (21): 107). (A. Wahid, 2006: 11).

Firman Tuhan berikut juga sering dijadikan landasan bagi gagasan negara Islam; “*Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian, Ku-tuntaskan bagi kalian pemberian nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama*” (al yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu ‘alaikum nikmatî wa radhîtu lakum al-Islama dîinâ). Firman Tuhan itu diandaikan menunjuk Islam sebagai sebuah sistem hidup yang sempurna, dan itu hanya dapat terwujud dalam sebuah sistem kenegaraan yang “berbau agama”. Diandaikan, tanpa negara, Islam tidak dapat diwujudkan dengan sempurna. Sebuah andaian yang justru harus kita bicarakan secara tuntas. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka dasar bagi sebuah negara Islam akan goyah selamanya dan gagasan bernegara seperti itu akan kehilangan kredibilitas (A. Wahid, 2006: 11).

Dalam perkembangan sejarah, ditunjukkan Gus Dur, tidak ada sistem tunggal maupun menetap dalam Islam. Umpamanya saja, tidak ada cara untuk menetapkan pergantian pemimpin. Dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib ke para Raja setelah mereka, kemudian para Presiden hingga para Amir di masa kini, semuanya menjadi saksi bagi kelangkaan adanya suksesi dalam Islam, walaupun harus ada suksesi sebagai tuntutan sejarah, tanpa disebut caranya. Begitu juga, ukuran “masyarakat Islam” tidak pernah sama. Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar memimpin Madinah sebagai komunitas, Umar memimpin imperium Islam dari Persia di timur hingga Gibraltar di barat, negara-bangsa (*nation-state*) di bawah imperialisme hingga kini, dan negara kota (*city-state*) di kawasan-kawasan teluk saat ini, semuanya memiliki legitimitas yang sama dalam pandangan Islam (A. Wahid, 2006: 15).

Menurut Syafii Anwar, benang merah yang sangat penting dari pemikiran Gus Dur adalah penolakannya terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syari’atisasi Islam. Sebaliknya, Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama ini untuk berkembang secara kultural. Dengan kata lain, Gus Dur lebih

memberikan apresiasi kepada upaya kulturalisasi (*culturalization*). Ketidaksetujuan Gus Dur terhadap formalisasi Islam itu terlihat, misalnya terhadap tafsiran ayat Al Qur'an yang berbunyi "udhkuluu fi al silmi kaffah", yang seringkali ditafsirkan secara literal oleh para pendukung Islam formalis. Jika kelompok Islam formalis yang menafsirkan kata "al-silmi" dengan kata "Islami", Gus Dur menafsirkan kata tersebut dengan "perdamaian". Menurut Gus Dur, untuk menjadi Muslim yang baik, seorang Muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan ujian. Konsekuensinya, mewujudkan sistem Islami atau formalisasi tidaklah menjadi syarat bagi seseorang untuk diberi predikat sebagai muslim yang taat (A. Wahid, 2006).

Bagi Gus Dur, dalam konteks ini harus jelas, mana yang menjadi batasan antara peranan negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama. Negara hanya bersifat membantu, justru masyarakat yang harus berperan menentukan hidup matinya agama tersebut di negeri ini. Menurutnya, tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Jika semua agama itu bersikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas dari senang atau tidaknya pejabat pemerintahan. Sangat jelas dari uraian di atas, bahwa diskriminasi memang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis. Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang besar. Perbedaan di antara kita, justru harus dianggap sebagai kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan Islam, wajar terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah bangsa besar, seperti manusia Indonesia (A. Wahid, 2006: 167).

Karenanya, bagi Gus Dur, pembahasan mengenai hubungan antara agama dan ideologi negara, sebaiknya dibatasi pada pandangan-pandangan agama yang ada mengenai struktur sosial yang adil bagi seluruh warga masyarakat, dan menuju pada kemakmuran bangsa. Pendekatan struktural ini diperlukan, karena memang semua agama menghendaki masyarakat yang adil, menuju pencapaian kemakmuran. "Baladun tayyibatun wa rabbun ghafûr" (negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun) adalah semboyan upaya kaum muslimin dalam menciptakan masyarakat

yang demikian itu, sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Karenanya, membahas hubungan antara Islam dengan negara, dengan membahas struktur masyarakat yang hendak didirikan, adalah sesuatu yang secara inherent menyangkut keadilan, dan dengan demikian merupakan struktur masyarakat yang benar (A. Wahid, 2006: 263).

Demokrasi merupakan salah satu tema besar didalam perjuangan Gus Dur dengan konsekuensi logis yang dianggap sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam adalah karena demokrasi tersebut mempunyai beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, karena Islam adalah agama hukum dengan pengertian bahwa agama Islam berlaku secara universal. Kedua, karena Islam memiliki asas permusyawaratan (*amruhum syuraa bainahum*), artinya bahwa harus ada kekompakan bersama untuk membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka yang pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan secara bersamaan. Ketiga, karena Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (Miskan, 2018: 41). Konsekuensi dari pandangannya tentang demokrasi, Gus Dur menolak gagasan ideologisasi, dan syari'atisasi Islam dalam struktur bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Menurut Syafii Anwar, paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum Muslimin terpolarisasi dalam dua bentuk, yaitu: (1) substantif-inklusif, dan (2) legal-eksklusif. Dengan memahami kedua paradigma pemikiran politik Islam tersebut, kita akan bisa memahami alasan Gus Dur menolak formalisasi, ideologisasi, dan syari'atisasi Islam tersebut. Jelas kiranya bahwa sebagai pemikir Islam substantif-inklusif, kritik-kritik Gus Dur banyak diarahkan kepada pada pendukung paradigma legal-eksklusif, yang banyak dianut oleh kelompok Islam radikal, fundamentalis, maupun kelompok-kelompok revivalis lainnya (A. Wahid, 2006).

Munculnya gagasan Gus Dur tentang kemanusiaan karena adanya konflik yang terus berkepanjangan yang terjadi hingga sekarang ini, baik konflik atas nama suku, ras, etnis, golongan maupun konflik SARA terjadi secara tiba-tiba di berbagai pelosok yang ada di negara Indonesia. Konflik tersebut jelas menunjukkan ketidakadanya rasa toleransi untuk saling menghargai serta menghormati keberagaman terhadap kemanusiaan, dan ini tentu mudahnya orang main hakim sendiri (Miskan, 2018: 42). Selain itu, menurut Syafii Anwar, Gus Dur juga menghindari satu sudut pandang saja dalam melihat banyak hal, termasuk agama. Gus Dur memperlihatkan bahwa pluralitas

diutamakan termasuk dalam melihat Islam: “Islam ku, Islam Anda, Islam Kita”. Tak ada satu Islam, Islam adalah multi wajah, wajah manusiawi. Pluralitas dalam melihat Islam dan kehidupan, dengan bersandar pada etika dan spiritualitas, diusulkan Gus Dur, termasuk untuk mengelola dunia yang terus bergerak ke arah globalisasi ini: untuk perdamaian abadi dan saling menghormati antar bangsa dan antar manusia (A. Wahid, 2006).

Mengenai hubungan agama dan budaya, menurut Gus Dur, mengharuskan kita menyadari bahwa setiap agama di samping ajaran-ajaran formal yang dimilikinya, juga mempunyai proses saling mengambil dengan aspek-aspek lain dari kehidupan budaya. Di sinilah kita harus selalu menerima adanya perkembangan empirik yang sering dinamakan studi kawasan mengenai Islam. (A. Wahid, 2006: 284). Sikap Islam dalam hal ini, yaitu tidak menganggap rendah peradaban orang lain. Bahkan Islam mengajukan untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian dari pengembangannya. Untuk mencapai keunggulan itu Nabi bersabda “carilah ilmu hingga ke tanah Tiongkok” (utlubû al-ilmâ walau bâ al-shîn), bukankah hingga saat ini pun ilmu-ilmu kajian keagamaan Islam telah berkembang luas di kawasan tersebut? Dengan demikian, Nabi mengharuskan kita mencarinya ke mana-mana. Ini berarti kita tidak boleh apriori terhadap siapapun, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terdapat di mana-mana (A. Wahid, 2006: 285).

Peradaban Islam memiliki keunggulan budaya dari sudut penglihatan Islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya Islam-sebagai agama langit yang terakhir- tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Tetapi di pihak lain kaum muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Dengan demikian keunggulan atau ketertinggalan budaya Islam tidak terkait dengan penguasaan “kekuatan politis”, melainkan dari kemampuan budaya sebuah masyarakat muslim untuk memelihara kekuatan pendorong ke arah kemajuan, teknologi dan ilmu pengetahuan (A.Wahid, 2006: 286).

Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaan atau institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama “budaya” Islam masih ada di negeri ini, maka

Islam tidak mengalami kekalahan dan tidak harus “dipertahankan” dengan tindak kekerasan, seperti terorisme. Islam memiliki cara hidupnya sendiri, yang tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, karena cukup dikembangkan dalam bentuk budaya (A. Wahid, 2006: 329).

Kehidupan beragama kita, yang dengan sendirinya membawakan aspek kebudayaan dalam kebudayaan kita, bagaimanapun juga haruslah berwatak rasional. Ini tidak berarti memandang rendah tradisionalisme agama, karena elemen-elemen positif dan rasional dari tradisionalisme itu sendiri harus kita teruskan. Tetapi unsur-unsur irrasional yang akan menghambat fungsionalisasi tradisionalisme itu sendiri haruslah diganti dengan nilai-nilai rasional yang akan menjamin kelangsungan tradisionalisme agama itu sendiri. Dengan demikian, revitalisasi tradisionalisme agama sangat diperlukan, dalam bentuk memasukkan unsur-unsur rasional ke dalamnya, hingga tradisionalisme agama itu sendiri dapat dirasakan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradisionalisme agama populis (A. Wahid, 2006: 38).

### **3. Pengaruh Pemikiran Multikultural K.H.Abdurrahman Wahid bagi Kehidupan Beragama di Indonesia**

Gus Dur adalah salah seorang intelektual Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, melainkan juga karena percikan-percikan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi (M. Wahid, 2010). Kompleksitas wacana yang menjadi perhatian Gus Dur menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang generalis, bukan spesialis keilmuan tertentu. Hampir setiap isu kontemporer direspon Gus Dur. Ini mungkin berkaitan dengan posisinya sebagai pemimpin publik dan aktivis gerakan sosial, terutama di organisasi NU. Sebagai pemimpin berjuta-juta umat pada level nasional dan internasional (selaku Presiden WCRP) menjadikan Gus Dur untuk terlibat dalam segala urusan publik, mulai dari wacana internal keagamaan dan ke-NU-an hingga wacana global yang menjadi trend Dunia Ketiga (M. Wahid, 2010). Sebagai pengagas dan

pemikir, Gus Dur sangat maju dan kreatif melontarkan hal-hal baru, semaju dan kreatifnya dalam memperjuangkan liku-liku demokrasi di Indonesia (M. Wahid, 2010). Namun, di atas semua itu, komitmen Gus Dur terhadap demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, termasuk keterlibatannya melindungi dan membela kalangan minoritas dan yang tertindas, tak diragukan sedikitpun (M. Wahid, 2010).

M Syafii Anwar, ketika memberi kata pengantar berjudul “Islamku, Islam Anda, Islam Kita Membingkai Potret Pemikiran Politik KH Abdurrahman Wahid”, buku yang ia edit atas permintaan langsung Gus Dur kepadanya, menyatakan bahwa bagi sebagian besar warga Nahdliyin, Gus Dur adalah figur yang dihormati, betapapun *nyleneh* dan kontroversialnya ucapan dan tindakannya. Bukan saja karena ia adalah cucu pendiri NU Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, tapi juga karena Gus Dur adalah ulama-intelektual NU terkemuka dan berwawasan kosmopolitan. Seorang tokoh yang berhasil membawa NU menembus dan membebaskan batas-batas orientasi, visi, dan wawasan tradisionalisme NU untuk masuk ke wacana modern, liberal, dan kosmopolitan sambil tetap menjaga kelestarian tradisi klasik Islam. Melalui Gus Dur, NU sebagai organisasi Islam tradisional yang telah “mendunia” dan diperhitungkan dunia luar (A. Wahid, 2006).

Gus Dur merupakan tokoh cendekiawan muslim yang berasal dari lingkungan pesantren. Kedua kakeknya merupakan ulama yang cukup terkenal dan Kyai sepuh NU. Sebagai orang yang lahir dari keluarga pesantren ia paham betul mengenai ilmu keagamaan. Salah satunya ia berpendapat bahwa Islam washatiyah merupakan tengah-tengah, tidak bersikap ekstrim. Konsep Islam washatiyah ini penting diterapkan di Indonesia yang plural. Gagasan politik Islam Gus Dur juga sangat relevan diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk membendung gerakan-gerakan politik Islam yang ingin menerapkan sistem khilafah Islamiah. Sistem yang sebetulnya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun Indonesia menjadi negara dengan mayoritas umat muslim. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada umat agama lain yang hidup di Indonesia sehingga bersikap moderat dan berlaku adil dalam hidup berbangsa dan bernegara menjadi syarat wajib dalam upaya menjaga perdamaian di Indonesia khususnya dan perdamaian dunia pada umumnya (Bistara dan Arintan, 2022).

Semua pemikiran Gus Dur tentang multikulturalisme berimplikasi terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia yang dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu: pendidikan agama Islam Berbasis Neormodernisme, pendidikan agama Islam Berbasis Pesantren, pendidikan agama Islam yang beragam, kurikulum, dan metode pendidikan. Kaitannya dengan pesantren, Gus Dur berusaha menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan konteks zaman tanpa menghilangkan pesan moral pesantren tersebut. Semua pemikiran Gus Dur tentang pendidikan agama Islam di Indonesia bertujuan untuk menjawab segala tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Elaborasinya dalam konteks sosial menjadikannya sebagai wahana untuk merangkul perbedaan dengan mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan demi terwujudnya keselarasan di bawah bingkai Bhineka Tunggal Ika (Miskan, 2018).

Dalam soal pandangan Islam terhadap kekerasan dan terorisme, sikap Gus Dur sangat jelas: mengancam keras dan mengutuk penggunaan kekerasan oleh sejumlah kelompok Islam radikal. Menurut Gus Dur, satu-satunya alasan penggunaan kekerasan yang bisa ditolerir oleh Islam adalah jika kaum Muslimin diusir dari tempat tinggal mereka (*idza ukhriju min diyarihim*) (A. Wahid, 2006). Menurut Gus Dur, dikutip anwar, lahirnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau radikal tersebut tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. Pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena “ketertinggalan” ummat Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Kedua, kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak terlepas dari karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, khususnya angkatan mudanya, sehingga pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada (A. Wahid, 2006).

Perhatian dan kesadaran akan keragaman yang dimiliki bangsa ini menjadi dasar bagi Gus Dur untuk melakukan pembelaan dan mengakomodir perbedaan dan kebutuhan yang berbeda dari setiap warga Negara. Menurut Muhammad Ulul Fahmi, nilai-nilai multikultural yang dikembangkan Gus Dur yang memiliki implikasi terhadap pemikiran pendidikan damai di Indonesia, adalah: (1) Nilai Saling Menghargai, (2) Nilai Humanisme, (3) Nilai Inklusif, dan (4) Nilai Keadilan. Pemikiran

Gus Dur tentang nilai-nilai multikultural bisa berimplikasi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Prinsip dan nilai yang ada dalam multikulturalisme melahirkan ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antar sesama serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil dan damai (Fahmi, 2022:12-13).

Implikasi nilai saling menghargai yang dikembangkan Gus Dur diantaranya adalah sikap toleransi. Pengenalan benih-benih sikap toleransi, penghargaan terhadap sesama dalam pendidikan formal maupun non-formal baik disekolah-sekolah akan menjadi fondasi kuat bagi tercapainya perdamaian. Menguatnya sikap toleransi juga dapat bermanfaat untuk menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah perpecahan dan juga menyatukan perbedaan (Fahmi, 2022: 8). Pemikiran Gus Dur lainnya yang mengandung nilai saling menghargai adalah "Pribumisasi Islam". Gagasan ini pertama kali dipaparkan dalam dua tulisan Gus Dur yaitu tulisan yang berjudul "Salahkah Jika Dipribumikan?" Tulisan kolomnya di majalah Tempo pada 16 juli 1983, dan kedua, "pribumisasi Islam", antologi tulisan dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, yang tim INCRoS pada 2000. Penghargaan terhadap tradisi atau budaya ditengah masyarakat yang selaras dengan gagasan "Pribumisasi Islam" juga berimplikasi untuk mendamaikan masyarakat dan menghindarkan gesekan-gesekan antar sesama. Maka, tradisi lokal yang sudah terbentuk sejak lama dapat terpelihara dan mereka yang masih menjunjung tinggi nilai tersebut merasa dihargai. Hal ini bisa menghindarkan perpecahan di masyarakat (Fahmi, 2022: 8).

Sedangkan nilai kedua, nilai humanisme Gus Dur, berimplikasi terhadap pandangannya tentang agama dan kemanusiaan. Menurut Gus Dur, agama dan kemanusiaan adalah dua hal yang menyatu dalam diri manusia. Seseorang tidak boleh mengatasnamakan agama kemudian merendahkan kemanusiaan dan atas nama kemanusiaan lalu merendahkan agama. Keduanya adalah sesuatu yang sistemik dan holistik. Beragama yang benar adalah beragama yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan berkemanusiaan yang benar adalah yang didasari oleh keyakinan agama yang benar. Jadi, relasi antara agama dan kemanusiaan bukanlah saling menihilkan tetapi saling menguatkan dan mengisi. (Fahmi, 2022: 9).

Pandangan Gus Dur mengenai humanisme juga terlihat pada pandangannya tentang universalisme Islam. Menurutnya, Islam adalah agama yang rahmatil lil 'alamin, rahmat sekalian alam, melindungi minoritas dan mengajarkan perdamaian. Kaitannya dengan pendidikan damai, unsur humanisme sangat diperlukan dalam kurikulum pendidikan berbasis kemanusiaan. Melalui kurikulum pendidikan ini, penanaman sikap penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang latarbelakang apapun dapat mencegah terjadinya perpecahan dan menjaga perdamaian. Penanaman prinsip ini juga meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan (Fahmi, 2022: 9).

Implikasi nilai Inklusif Gus Dur adalah dengan mengedepankan watak inklusifisme dan berkomitmen dalam menciptakan budaya yang demokratis. Hal ini secara khusus diterapkan Gus Dur di internal warga nahdliyin. Budaya keterbukaan (inklusif), budaya untuk saling menghargai, dan toleran (*tasamuh*) terhadap perbedaan pendapat, perbedaan agama, menjadi ciri khas dari sikap kemasyarakatan NU. Sementara itu, di luar komunitas NU, perubahan yang paling terasa adalah tumbuhnya budaya untuk menghargai kelompok atau komunitas lain, termasuk kelompok minoritas, baik etnis, maupun agama. Ditinjau dari perspektif yang lebih luas, aspek penting yang seharusnya dibangun oleh seluruh komponen bangsa ini adalah dialog. Dialog menandakan adanya kemauan dan keterbukaan diri untuk saling menghargai (Fahmi, 2022: 9).

Pendekatan dialog secara inklusif sering dipraktekkan Gus Dur ketika menghadapi permasalahan yang berbau SARA, contohnya seperti yang terjadi di Papua. Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur mengajak dialog seluruh komponen masyarakat yang ada dan tidak hanya warga Papua saja tetapi juga anggota OPM atau yang sekarang dinamakan KKB. Dalam dialog tersebut, Gus Dur mengusulkan nama Irian Jaya diganti menjadi Papua Papua ebagai penghormatan rakyat Irian jaya. Tidak hanya itu, Gus Dur juga mengizinkan OPM mengibarkan bendera bintang kejora, sebagai bendera kebudayaan rakyat Papua. Pendekatan yang dilakukan Gus Dur terhadap mereka menyebabkan Gus Dur sangat dihargai dan dicintai rakyat Papua hingga saat ini. Konflik dan kekerasan saat itu bisa diatasi dengan baik, masyarakat hidup rukun dan damai, kekerasan bisa hentikan dengan tanpa memakan korban jiwa.

Dengan demikian, dialog merupakan salah satu bentuk sikap atau nilai inklusif. Dalam pendidikan dan pengajaran tentang menciptakan kedamaian, perlu menekankan nilai atau prinsip inklusif atau keterbukaan karena pendidikan damai mengajarkan untuk berfikir secara terbuka, demokratis dan tidak ditutup-tutupi dalam berbagai hal (Fahmi, 2022:10).

Implikasi nilai keadilan Gus Dur sangat nampak pada masa Orde Baru dimana ia secara konsisten mengkritik kebijakan Soeharto yang dinilai tidak adil dan mementingkan kelompok tertentu. Beberapa peristiwa kekerasan dan ketidakadilan banyak dibela oleh Gus Dur. Pembelaan terhadap korban-korban ketidakadilan ini diyakini Gus Dur sebagai bagian dari etis dan moral kemanusiaan. Akan tetapi dalam kesempatan lain, Gus Dur mengingatkan pentingnya penegakan keadilan dan pembelaan terhadap korban-korban ketidakadilan sebagai bagian dari perintah agama. Implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga Negara adalah dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar manusia. (Fahmi, 2022:10)

Keadilan menjadi syarat bagi terciptanya perdamaian. Beberapa konflik diberbagai belahan dunia salah satunya disebabkan kelalaian dan ketidakmampuan para pemimpinnya dalam bersikap adil. Ketidakadilan dan keberpihakan pada salah satu kelompok tertentu, membuat kelompok lainnya merasa diperlakukan tidak adil dan hal ini yang memicu terjadinya pemberontakan dan juga konflik antar sesama warga bangsa (Fahmi, 2022:11). Dalam hal ini, corak pemikiran Gus Dur yang menjadi sumbangsih bagi kesejahteraan negara dan masyarakat menurut Maman Imanulhaq Faqieh adalah: Pertama, demokrasi dan keadilan sosial. Dalam hal ini Gus Dur menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya terhenti pada tataran prosedural belaka, melainkan harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat, terutama mereka yang paling lemah. Kedua, pluralisme atau kebhinekaan. Sejak awal, bangsa ini dibangun di atas kebhinekaan suku, bahasa dan agama. Kebhinekaan tersebut merupakan rahmat Tuhan yang indah yang patut disyukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan merawat dan mengembangkannya untuk kemajuan bangsa. Acuan utama yang digunakan Gus Dur untuk merayakan kebhinekaan adalah dengan menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan dan eksistensi setiap kelompok. Ketiga, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Islam menurut Gus Dur

merupakan agama yang meletakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasinya. Oleh sebab itu, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan prinsip untuk membangun kesetaraan dalam kebangsaan. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme yang mengakui realitas heterogenitas dalam masyarakat, yang bersikap arif dan kedewasaan dalam berpikir dengan tanpa memandang agama, warna kulit, etnis, dan ras (Miskan, 2018: 39).

Paham keislaman tradisional *ahlussunnah waljama'ah* serta pemikirannya yang liberal, menurut Gus Dur, menjadikan konsep Islam harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman serta mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Artinya bahwa nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan daripada legal-simbolis yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa "embel-embel" Islam. Namun ruh keislaman harus selalu menyatu dalam wajah nasionalisme (Miskan, 2018: 40). Gus Dur juga menyarankan, agar para pemuka agama dan para pemimpin adat harus benar-benar menjadi pemimpin masyarakat dalam arti selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat dan bukannya kelangsungan lembaga-lembaga yang mereka pimpin. Jelas bagi kita, bahwa para pemuka adat dan pemuka agama itu di masa depan harus mengambil peran lebih banyak sebagai pemimpin masyarakat (A. Wahid, 2006: 297).

Menurut Gus Dur, dalam ajaran Islam, satu ke lain orangpun terdapat pluralitas/kemajemukan pendapat, ini diterima sebagai prinsip pengaturan hidup bermasyarakat: "perbedaan para pemimpin adalah rahmat bagi umat" (*ikhtilâf al-'immah rahmat al-ummah*). Prinsip ini sangat dipegang teguh dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga kita lihat perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, karenanya kaum muslimin hanya dapat dipersatukan dalam masalah-masalah dasar belaka, seperti keharusan adanya keadilan dan sebagainya (A. Wahid, 2006: 350).

Gus Dur menunjukkan bahwa selalu ada pendapat yang berbeda dalam gerakan Islam mengenai sesuatu yang dianggap penting. Tidakkah ini menunjukkan perbedaan antara mereka di saat-saat yang sangat menentukan seperti di masa kini? Jawabannya, menurut Gus Dur, persoalan itu tergantung dari sikap kaum muslimin sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin dapat dibagi dua, dalam pendekatan mereka kepada perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Di satu pihak, ada kaum muslimin yang merasakan tidak ada keharusan bergabung dalam gerakan-gerakan Islam tersebut. Di lain pihak, ada pengikut gerakan-gerakan Islam modernis dan tradisional, dan di samping mereka yang mengikuti strategi budaya atau strategi ideologis. Inilah yang senantiasa harus diingat, kalau kita berbicara tentang Islam Indonesia saat ini (A. Wahid, 2006: 357).

Dalam sebuah pendekatan, yaitu ilmiah atau tidak subyektif adalah persyaratan mutlak bagi sebuah pandangan/pendapat yang baik. Karena itu, dalam pendekatan sesulit apapun, emosi tidak boleh digunakan, walaupun kita berada dalam keadaan terjepit/tersudut. Argumentasi yang baik harus kering dari emosi untuk mencapai obyektivitas yang dimaksudkan (A. Wahid, 2006: 357). Salah satu tanda pendangkalan agama yang terjadi di kalangan gerakan radikal Islam adalah upaya memandangi hal-hal yang berbau kelembagaan/institusional sebagai satu-satunya ukuran "keberhasilan" kaum muslimin. Padahal kultur Islam lainnya, seperti, rebana, sufisme dan sebagainya, cukup menonjol, bahkan kaum muslimin berhasil menolak pengaruh "Barat." Karena itu, pandangan yang membedakan antara mereka, adalah pandangan yang tidak mengenal kaum muslimin dan hakikat Islam (A. Wahid, 2006: 361).

Gus Dur menjelaskan hakekat Islam sebagai agama perdamaian, yang disalah-mengerti oleh sebagian kecil kaum muslimin sendiri, dengan tindakan-tindakan penuh kekerasan yang mereka lakukan. Menurutnya, hal ini mereka lakukan karena dua hal. Di satu sisi, mereka hanya mementingkan institusi (kelembagaan) dalam Islam, yang sekarang tengah terancam di mana-mana dalam masyarakat yang berteknologi maju. Mereka lupa, bahwa Islam juga membawakan kultur/budaya kesantian, yang justru sekarang semakin berkembang sebagai pertahanan kaum muslimin dalam menghadapi "serangan teknologi maju" itu. Di sisi kedua, mereka yang melakukan terorisme itu tidak pernah mendalami Islam sebagai bidang kajian, karena itu mereka tidak mengenal kultur/ budaya santri itu. Sebagai akibatnya, lalu mereka langsung mengambil dari sumber-sumber tertulis Islam (*al-adillah al-naqliyyah*), tanpa mengetahui deretan penafsiran yang sudah berjalan berabad-abad, untuk memahami kitab suci al-Qur'ân dan Hadits Nabi Muhammad Saw melalui perubahan-perubahan

penafsirannya. Inilah yang membuat mengapa Islam memahami toleransi dan menerima pluralitas, yang berujung pada penerimaan mayoritas muslim di negeri ini akan Pancasila dan penolakan mereka atas negara Islam melalui penghapusan Piagam Jakarta dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (A. Wahid, 2006: 366).

Bagi Gus Dur, menjaga Keutuhan NKRI itu lebih utama, oleh sebab itu, pengaturan melalui kesejahteraan/keselamatan/keutuhan sesuatu, secara langsung atau tidak langsung, menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahulu. Contoh terbaik dalam hal ini adalah gugurnya Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) dari Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Bahwa para ulama fiqh (Hukum Islam) tidak menolak tindakan itu, menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejahteraan umat dinilai begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam. Dengan demikian, tertolaklah anggapan bahwa Islam hanya bersandar pada formalitas belaka. Secara kultural, masuknya beberapa unsur budaya lokal ke dalam budaya Islam, atau sebaliknya, merupakan bukti kuat akan hal ini (A. Wahid, 2006: 22).

Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam membangun sebuah bangsa, justru bukannya mementingkan formalisasi ajaran-ajaran agama tersebut dalam kehidupan. Karena itu, persoalan formalisasi ideologi Islam dalam kehidupan bernegara tidak menjadi kebutuhan utama. Justru penampilan dari agama tersebut harus terwujud tanpa formalisasi dirinya dalam kehidupan bernegara, seperti di negara ini. Dengan demikian, agama Islam menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara. (A. Wahid, 2006: 23).

Sejarah perkembangan Islam di manapun juga, menurut Gus Dur, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Karena kedua faktor dari agama langit ini (individu dan sosial) memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita merasakan perlu adanya keseimbangan antara keduanya. Yang menambah galaunya persoalan, adalah kenyataan, bahwa kitab suci al-Qurân tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu dalam kandungannya. Seluruhnya hanya bersandar pada kemampuan kita memahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (khittah) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat (A. Wahid, 2006: 24).

Inilah yang menjadi tema utama yang harus diperhatikan dalam mencermati perkembangan Islam di negeri ini, yang sering disebut sebagai “negerinya kaum muslim moderat.” Kegagalan mengambil sikap ini, apapun alasannya (ideologis ataupun politis), jelas hanya menjadi tantangan belaka bagi kaum muslimin moderat di negeri ini. Dengan mencoba bersikap simpatik kepada pendekatan ideologis, Gus Dur bermaksud menekankan pentingnya saling pengertian antara kedua pendekatan tersebut. Terorisme berasal dari ketidakpahaman kita akan proses modernisasi yang dialami bangsa kita dalam abad ke 19 Masehi hingga saat ini, dan mungkin di masa depan. Kalau kita tidak menginginkan terorisme merajalela di negeri kita, dengan menggunakan nama Islam, tentu pendekatan ideologis ini harus benar-benar di perhatikan dengan cermat (A. Wahid, 2006: 59).

### **Simpulan**

Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan tiga hal, yaitu: pertama, kesadaran multikultural dalam beragama adalah hal yang penting, setidaknya, ada alasan bahwa kemajuan globalisasi kontemporer melahirkan kompleksitas dan multiplisitas baik mencakup kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, majupun keagamaan. Alasan lainnya, bahwa konsekuensi logis yang menimpa masyarakat-bangsa Indonesia akibat gelombang globalisasi ini adalah semakin tergerusnya identitas Keindonesiaan itu sendiri. Dalam konteks inilah maka upaya rethinking, reaktualisasi dan revitalisasi identitas “Keindonesiaan” dapat menjadi alternatif dalam membentengi masyarakat Indonesia dari gempuran globalisasi. Dalam konteks ruang publik global, perebutan peran bukan lagi hal yang asing dan aneh. Berhadapan dengan konflik-konflik perbedaan budaya, agama, dan ras, kumandang narasi otoritatif justru mendaraskan kembali fakta primordial Indonesia sebagai negara multikultural. Alasannya, pluralitas budaya, agama, dan ras, hakiki bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Warga dan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan berbagai keragaman budaya, baik suku, etnis, agama serta ideologi yang merupakan keunikan bagi Negara Indonesia tersendiri. Dengan keragaman ini diharapkan dapat membentuk sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat dengan tanpa memandang perbedaan agama, warna

kulit, etnis, ras, dan status sosial, serta tanpa menaruh rasa curiga dan prasangka buruk terhadap kelompok lain. Sebagai anggota masyarakat, umumnya bangsa dan negara sudah terlanjur majemuk yang konsekuensinya adalah menghormati pluralitas masyarakat itu sendiri, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dan perdamaian antara sesama masyarakat di dalamnya.

Kedua, pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang kesadaran multikultural dalam beragama dilandasi pandangannya tentang multikulturalisme itu sendiri. Menurut Gus Dur, multikulturalisme merupakan suatu pengakuan terhadap heterogenitas budaya, etnik, ras, agama dan gender. Multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan bersama apabila realitas heterogenitas terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks inilah peran serta masyarakat sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa agar kemajemukan tersebut dapat tampil sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Gus Dur sangat terbuka terhadap konsep multikulturalisme yang berusaha mengakomodir segala perbedaan dengan selalu hidup berdampingan secara damai. Dalam konteks pemikiran multikulturalisme, Gus Dur tidak hanya mengadopsi cara berpikir klasik, tetapi juga berusaha mencampurkannya dengan pemikiran modern. pemikiran Gus Dur tentang multikulturalisme beragama dapat dilihat dari beberapa aspek: karakteristik multikulturalisme, pribumisasi Islam, hubungan agama dan negara, demokratisasi, prinsip-prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat, dan hubungan antara agama dan budaya.

Ketiga, pengaruh pemikiran multikultural K.H. Abdurrahman Wahid bagi kehidupan beragama di Indonesia. Gus Dur adalah salah seorang intelektual Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, melainkan juga karena percikan-percikan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi. Perhatian dan kesadaran akan keragaman yang dimiliki bangsa ini menjadi dasar bagi Gus Dur untuk melakukan pembelaan dan mengakomodir perbedaan dan kebutuhan yang berbeda dari setiap warga Negara. Nilai-nilai multikultural yang dikembangkan Gus Dur yang memiliki implikasi terhadap pemikiran pendidikan damai di Indonesia, adalah: (1) Nilai Saling Menghargai, (2) Nilai Humanisme, (3) Nilai Inklusif, dan (4) Nilai Keadilan. Pemikiran

Gus Dur tentang nilai-nilai multikultural bisa berimplikasi terhadap terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai. Prinsip dan nilai yang ada dalam multikulturalisme melahirkan ketenangan, kedamaian dan kasih sayang antar sesama serta terwujudnya masyarakat Indonesia yang toleran, aman, adil dan damai. Bagi Gus Dur, menjaga Keutuhan NKRI itu lebih utama, oleh sebab itu, pengaturan melalui kesejahteraan/keselamatan/keutuhan sesuatu, secara langsung atau tidak langsung, menjadi pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahulu.

### Daftar Pustaka

- Bistara, R., & Marintan, M. A. (2022). Islam Wasathiyah Dalam Gagasan Politik Islam: Menguak Pemikiran Islam Wasathiyah KH Abdurrahman Wahid. *International Conference on Cultures and Languages (ICCL)*, 913–931. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/iccl/article/download/5816/1996>
- Fahmi, M. U. (2022). Multikulturalisme Dan Pendidikan Damai Perspektif KH. Abdurrahman Wahid. *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 6(2), 1–13.
- Kewuel, H. K., Budiyanto, A., Fajar, Y., & Kumoro, N. B. (2017). *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-batas Toleransi* (H. K. Kewuel, A. Budiyanto, Y. Fajar, & N. B. Kumoro (eds.)). Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
- Lumowa, V. (2022). Diskursus multikulturalisme dan wajah Indonesiannya. *Jurnal Filsafat*, 32(2), 311–344. <https://doi.org/10.22146/jf.66815>
- Mahfud, C. (2019). *Tantangan Global dan Lokal Islam di Indonesia* (Alviana C (ed.); 1st ed.). Penerbit Samudra Biru.
- Miskan. (2018). Pemikiran Multikulturalisme K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Al Furqan*, VI(2), 1–12.
- Ridwan, B., Ghufroon, Supardi, Mubasirun, Maesur, S., Faidi, A., & Maharani, S. (2018). Menakar Kesadaran Politik, Ekonomi, dan Budaya. In B. Ridwan, Ghufroon, Supardi, Mubasirun, S. Maesur, A. Faidi, & S. Maharani (Eds.), *Identitas dan Globalisasi: Menakar Kesadaran Politik, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Muslim Indonesia* (p. 196). Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga.

- Rusli, M. (2015). Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur. *Farabi*, 12(1), 50–71.
- Sayuthi Ali. (2002). *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Radja Grafindo Persada.
- Sutikno. (2022). Islam Dan Globalisasi (Pengembangan Nalar Kritis Dalam Ilmu Kelslaman Kontemporer ). *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 298–311.
- Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi. In *The Wahid Institution* (The Wahid). The Wahid Institution.
- Wahid, M. (2010). Peta Intelektualisme dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur. In Ilman Nafi'a (Ed.), *Gus Dur Di Mata Wong Cirebon* (1st ed., pp. 65–102). PILAR MEDIA.